

**KEPENTINGAN EKONOMI POLITIK ISLANDIA MEMPERTAHANKAN  
KERJASAMA EKONOMI DENGAN UNI EROPA MELALUI PERJANJIAN  
EUROPEAN ECONOMIC AREA (EEA)**

Sukmika Mardalena\* & Indra Pahlawan, S.IP, M.Si\*  
[m.sukmika@yahoo.co.id](mailto:m.sukmika@yahoo.co.id)

**Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau  
Kampus Bina Widya km. 12,5 Simpang Baru - Pekanbaru 28293**

*Abstract*

*Economic cooperation between Iceland with regional organizations in Europe has been started since 1970, the relationship is marked by the merger of Iceland to the European Free Trade Area (EFTA), a free trade organization in Europe. In 1972, Iceland establish bilateral relations with the European Economic Citizens (before it became the EU) in which to discuss about the free trade agreement. This relationship is growing up in 1994, Iceland joined into an agreement European Economic Area (EEA). Through the EEA agreement, Iceland has access to the EU internal market, but as a consequence of Iceland is required to adopt EU regulations relevant to the internal market. This research will discuss why Iceland retains the EEA economic cooperation with the EU. This research used qualitative research methods that the source data is taken from books, journals, newspapers, internet, and previous research has relevant data with the title. The writer uses liberalism perspective and nation state level analysis. By using the concept national interest and theory of theory of international cooperation's K.J Holsti. Iceland maintains the EEA agreement because of the economic and political interests. Economically EEA agreement Iceland expand the international market, increase exports and imports to EU countries and boost GDP growth. Political interests of Iceland is to provide access without having to become an official member of the European Union, to protect fisheries and agricultural controls.*

***Keywords: National Interst, European Economic Area, European Union, Internal Market***

---

\*Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional FISIP UR Angkatan 2011

\*Dosen Jurusan Hubungan Internasional FISIP UR

## Pendahuluan

Penelitian ini merupakan studi mengenai ketergantungan dan keterikatan antar bangsa dalam hubungan internasional. Dalam penelitian ini penulis mengangkat permasalahan mengenai hubungan Islandia dengan Uni Eropa terkait dengan perjanjian *European Economic Area* (EEA). Melalui perjanjian EEA, Islandia memiliki akses dalam pasar internal Uni Eropa, namun sebagai konsekuensinya Islandia diharuskan untuk mengadopsi peraturan-peraturan Uni Eropa yang relevan dengan pasar internal. Penelitian ini akan membahas mengapa Islandia tetap mempertahankan kerjasama ekonomi EEA tersebut dengan Uni Eropa.

Hubungan kerja sama ekonomi antara Islandia dengan organisasi regional di Eropa sudah bermula sejak tahun 1970, hubungan tersebut ditandai dengan bergabungnya Islandia ke dalam *European Free Trade Area* (EFTA), sebuah organisasi perdagangan bebas di Eropa. Pada tahun 1972, Islandia membangun hubungan bilateral dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (sebelum menjadi Uni Eropa) yang di dalamnya membahas tentang perjanjian perdagangan bebas. Hubungan ini semakin berkembang hingga pada tahun 1994, Islandia ikut bergabung ke dalam perjanjian *European Economic Area* (EEA).

*European Economic Area* (EEA) merupakan kerjasama ekonomi antara 28 negara-negara Uni Eropa dengan tiga negara EFTA yaitu Islandia, Norwegia dan Liechtenstein untuk membentuk sebuah pasar bersama yang dimulai pada 1 Januari 1994 dengan prinsip mencakup empat kebebasan: pergerakan bebas orang, barang, jasa, dan modal.<sup>1</sup> Hal ini memungkinkan Islandia untuk berpartisipasi di pasar internal Uni Eropa tanpa harus menjadi anggota resmi Uni Eropa.

Keanggotaan dari perjanjian EEA ini terdiri dari 28 negara Uni Eropa (Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Rumania, Slowakia, Spanyol, Swedia dan Inggris Raya) dan tiga negara EFTA (Islandia, Norwegia dan Liechtenstein), sedangkan Swiss yang juga merupakan negara EFTA memilih untuk tidak bergabung dengan EEA melainkan berkerjasama dengan Uni Eropa secara bilateral.

Perjanjian EEA didasarkan pada undang-undang utama dari Uni Eropa yaitu *Acquis Communautaire* (kerangka hukum bersama Uni Eropa), dan undang-undang sekunder (arahan, keputusan Uni Eropa yang relevan dengan EEA).<sup>2</sup> Oleh sebab itu sebagian besar dari aturan perjanjian EEA identik dengan undang-undang Uni Eropa yang berkaitan dengan empat kebebasan: pergerakan bebas barang, jasa, investasi dan tenaga kerja.

Faktanya perjanjian EEA telah mempengaruhi Islandia tidak hanya yang berkaitan dengan empat kebebasan, seperti pada kebijakan lingkungan, transportasi dan kesehatan sebagian besar semua undang-undang disahkan di parlemen Islandia melalui perjanjian EEA.<sup>3</sup> Peraturan Uni Eropa melarang berbagai operator pesawat dari Afrika dan Asia beroperasi di Uni Eropa juga diberlakukan di Islandia.<sup>4</sup> Hal ini jelas mempengaruhi kebijakan transportasi Islandia. Perjanjian EEA membawa efek yang sangat signifikan terhadap negara Islandia. Status non - keanggotaan menyebabkan

<sup>1</sup> Michael Alsbjerg dan Jesper Blaabjerg, 2012. *The EEA Agreement or the EU?*, (Master Thesis) Aalborg University, hal.33

<sup>2</sup> <http://www.efta.int/eea/eea-agreement>

<sup>3</sup> Einar Hanneson. 2006. Implementation of Internal Market Legislation Relevant to The Information Society: A Snapshot of the Current Regime in EFTA-EEA States. *Journal of International Commercial Law and Technology*, Vol. Issue 1

<sup>4</sup> Paul Simon, *Op.Cit hal 21*

Islandia tidak memiliki kontak langsung dengan badan-badan Uni Eropa terutama dalam hal pembuatan kebijakan. EEA terus memaksa Islandia untuk membuat banyak perubahan kelembagaan dan prosedural dalam proses administrasi dan kebijakan mereka.

### **Landasan Teori**

Teori merupakan suatu gagasan atau kerangka berpikir yang mengandung penjelasan ramalan atau anjuran pada setiap bidang penelitian. Penggunaan teori disesuaikan dengan perspektif dan tingkat analisis yang digunakan untuk membahas masalah ini. Perspektif yang digunakan adalah perspektif liberalisme.

Liberalisme menghindari kondisi yang penuh konflik antagonis terutama dengan melakukan kerjasama-kerjasama yang saling menguntungkan pihak-pihak yang terlibat. Pasar dilihat sebagai alat yang paling efisien untuk mengatur produksi dan pertukaran yang dilakukan manusia, mengarahkan dan mengoordinasi aktifitas perekonomian.

Tulisan ini menggunakan tingkat analisa adalah negara bangsa, analisis yang menekankan tingkat ini bersumsi bahwa hubungan internasional pada dasarnya didominasi oleh perilaku negara-bangsa. Dalam hal ini, perilaku individu, kelompok organisasi, lembaga dan proses perpolitikan akan diperhatikan sejauh berkaitan dengan tindakan internasional.

### **Teori Kerjasama Internasional**

Peneliti menggunakan teori Kerjasama Internasional yang dikemukakan oleh **K.J Holsti**. Proses kerjasama terbentuk dari perpaduan keseragaman masalah nasional, regional atau global yang muncul dan memerlukan perhatian lebih dari suatu negara. Masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan yang membawa usul penanggulangan masalah, mengumpulkan bukti-bukti tertulis untuk membenarkan suatu usul dan mengakhiri perundingan dengan

suatu perjanjian yang memuaskan semua pihak. K.J Holsti mendefinisikan kerjasama internasional sebagai berikut:

1. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus,
2. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya,
3. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan,
4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan,
5. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan setiap negara.<sup>5</sup>

Kerjasama internasional adalah salah satu usaha negara-negara untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang sama dan juga merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu sama lain. Kerjasama internasional pada umumnya berlangsung pada situasi-situasi yang bersifat desentralisasi yang kekurangan institusi-institusi dan norma-norma yang efektif bagi unit-unit yang berbeda secara kultur dan terpisah secara geografis, sehingga kebutuhan untuk mengatasi masalah yang menyangkut kurang memadainya informasi tentang motivasi dan tujuan berbagai pihak sangatlah penting.

Berdasarkan kasus dalam penelitian ini, perjanjian EEA merupakan instrumen bagi Islandia untuk bekerjasama dalam bidang ekonomi dengan Uni Eropa. Ketergantungan

---

<sup>5</sup> K.J Holsti, Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga, 1988, hal. 652-653

ekonomi terhadap Uni Eropa menjadi penyebab ketidakberdayaan negara Islandia untuk menolak peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Uni Eropa melalui perjanjian EEA sehingga secara tidak langsung Islandia menjadi terintergrasi dengan Uni Eropa.

Perekonomian Islandia sangat bergantung pada Uni Eropa. Sebagian besar ekspor Islandia tersebut di tujukan ke negara-negara Uni Eropa. Tujuan utama ekspor Islandia adalah Uni Eropa (64,3%), kemudian disusul oleh Norwegia (7,8%), Amerika Serikat (7,0%), dan Cina (4,6%). Ekspor Islandia ke Uni Eropa didominasi oleh ikan dan produk perikanan. Islandia adalah eksportir terbesar ketiga dari ikan dan produk perikanan ke Uni Eropa setelah Norwegia dan China. Pada tahun 2011, ekspor Islandia berjumlah lebih dari €933m yang setara dengan 5% dari seluruh impor ikan Uni Eropa. Islandia memerlukan perjanjian EEA ini untuk mengamankan akses ke pasar Uni Eropa. Hal inilah yang menyebabkan Islandia mempertahankan kerjasama ekonomi dengan Uni Eropa melalui perjanjian EEA.

### **Konsep Kepentingan Nasional**

Kepentingan nasional adalah tujuan-tujuan negara yang ingin di capai suhubungan dengan kebutuhan bangsa atau negara atau dengan hal yang dicita-citakan. Kepentingan nasional yang relative tetap dan sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan yang kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah serta kesejahteraan ekonomi. Kepentingan sering menjadi tolok ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap dan tindakan. Setiap langkah kebijakan luar negeri perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai kepentingan nasional.

Pemerintah Islandia memiliki kepentingan nasional dalam perjanjian EEA.

Keanggotaan Islandia dalam perjanjian EEA yang dimulai sejak tahun 1994 didasarkan karena adanya kepentingan ekonomi dan politik. Kepentingan ekonomi Islandia adalah pertama, memperluas pasar internasional Islandia. Melalui keanggotaan dalam EEA, Islandia memiliki akses perdagangan dengan 28 negara anggota Uni Eropa serta dua negara EFTA lainnya (Norwegia dan Liechtenstein) dalam suatu pasar bersama yang disebut pasar internal Uni Eropa. Kemudian meningkatkan pertumbuhan PDB Islandia sebagai implikasi keikutsertaan Islandia dalam pasar internal Uni Eropa dan meningkatkan ekspor impor Islandia ke negara-negara anggota EEA.

### **Hubungan Islandia dan Uni Eropa dalam Kerangka Kerja *European Economic Area* (EEA)**

Islandia memiliki hubungan yang sangat erat dengan Uni Eropa terutama setelah bergabungnya Islandia dalam perjanjian EEA dan terjadinya krisis ekonomi 2008. Uni Eropa merupakan pasar yang paling penting bagi Islandia, sehingga Islandia perlu untuk memastikan kebebasan akses ke pasar internal Uni Eropa atas dasar perjanjian EEA.

Pada tahun 2008 terjadi krisis ekonomi yang menyebabkan runtuhnya tiga bank terbesar Islandia (Kaupthing, Landsbanki, Glitnir) dan jatuhnya nilai mata uang krona atas euro.<sup>6</sup> Bergabung dengan Uni Eropa menjadi isu yang sangat menarik bagi masyarakat Islandia karena warga Islandia beranggapan dengan bergabungnya Islandia kedalam Uni Eropa maka dapat terselamatkan dari krisis keuangan yang terjadi tahun 2008. Islandia mulai negosiasi akses dengan Uni Eropa pada bulan Juli 2010 namun

---

<sup>6</sup> Joshua Fleitman, 2014. *The Icelandic Model: Post-Crisis Economic Recovery and Sustainability* tersedia di [monitorjournal.org/issues/19-1/1-fleitman.pdf](http://monitorjournal.org/issues/19-1/1-fleitman.pdf) diakses 7 Januari 2015, 9:47 WIB

memutuskan pada pertengahan 2013 untuk menanggukhan perundingan dengan Uni Eropa karena kekhawatiran tentang kehilangan kontrol atas sumber daya perikanan dan kekhawatiran atas krisis zona euro.

Hubungan dagang antara Uni Eropa dengan Islandia tercakup oleh kesepakatan perdagangan bebas antara Islandia dan masyarakat ekonomi eropa tahun 1972 dan perjanjian EEA yang mulai berlaku pada tahun 1994. Perjanjian EEA memberikan Islandia akses untuk bergabung dalam pasar internal Uni Eropa, dengan syarat Islandia harus mengadopsi hukum Uni Eropa yang berkaitan dengan peraturan pergerakan bebas barang, orang, jasa dan modal. Akses ke pasar internasional seperti pasar internal Uni Eropa adalah hal yang sangat penting bagi negara pengekspor seperti Islandia. EEA adalah tujuan utama ekspor dan impor Islandia, hampir 83% dari semua barang ekspor Islandia pada tahun 2012 ditujukan ke pasar internal Uni Eropa. Belanda, Jerman dan Inggris adalah mitra terpenting dalam perdagangan Islandia.<sup>7</sup> Perjanjian EEA memiliki arti penting bagi Islandia sebagai cara untuk memasuki pasar internal tanpa harus menjadi anggota resmi Uni Eropa.

Uni Eropa adalah mitra dagang paling penting Islandia, diikuti oleh Norwegia, Amerika Serikat, Cina dan Brazil. Ekspor Islandia ke Uni Eropa didominasi oleh ikan dan produk perikanan. Islandia adalah eksportir terbesar keempat ikan dan produk perikanan ke Uni Eropa setelah Norwegia, China dan Ekuador dalam hal nilai. Pada 2013, ekspor Islandia berjumlah lebih dari € 945m yang setara dengan 5,4% dari seluruh

impor ikan Uni Eropa.<sup>8</sup> Uni Eropa memiliki defisit perdagangan terhadap Islandia di sektor ini. Akses ke pasar internal telah menjadikan mayoritas perdagangan Islandia ditujukan pada negara-negara Uni Eropa sehingga secara ekonomi Islandia sangat tergantung pada pasar Uni Eropa.

### **Harmonisasi Undang-Undang Uni Eropa oleh Islandia melalui Perjanjian EEA**

Bergabungnya Islandia dalam perjanjian EEA berarti Islandia secara hukum terikat untuk mengimplementasikan hukum Uni Eropa yang mengatur pergerakan bebas barang, orang, jasa dan modal. Tidak ada angka yang pasti untuk menunjukkan seberapa banyak Islandia telah mengadopsi peraturan Uni Eropa. Mr. Ásgrimsson, pemimpin *Progressive Party* (PP) di Islandia menyatakan bahwa pada tahun 2003 melalui EEA dan Schengen Islandia telah mengadopsi lebih dari 80% dari seluruh Undang-Undang Uni Eropa. Dua tahun kemudian Menteri Luar Negeri Islandia, David Oddoson mengatakan bahwa Islandia hanya mengadopsi sekitar 6.5 % kebijakan Uni Eropa.<sup>9</sup> Kesenjangan yang terlalu besar ini disebabkan karena perbedaan pandangan, Mr. Ásgrimsson jelas bersimpati pada Uni Eropa sedangkan David Oddoson menolak intergrasi dengan Uni Eropa.

Dalam laporan kedutaan Islandia di Brussel pada pertengahan tahun 2014 dijabarkan sejumlah Undang-Undang Uni Eropa yang telah diadopsi oleh Islandia melalui perjanjian EEA, sebagian diantaranya adalah:

1. Peraturan Komisi (UE) No 497/2014 dari 14 Mei 2014 menggantikan Peraturan

---

<sup>7</sup> Iceland's accession negotiations with the EU tersedia di [http://eeas.europa.eu/delegations/iceland/eu\\_iceland/iceland\\_road/index\\_en.htm](http://eeas.europa.eu/delegations/iceland/eu_iceland/iceland_road/index_en.htm) diakses pada 11 Januari 2015, 12:09 WIB

---

<sup>8</sup> European Commission Directorate-General for Trade (Countries and regions, Islandia), tersedia di <http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/iceland/>, Diakses pada 9 Maret 2014, 11:18 WIB

<sup>9</sup> Bergman, Eirikur. 2011, *Iceland and the EEA, 1994-2011*, Europautredningen

Annex II (UE) No 1333/2008 dari Parlemen dan Dewan Eropa dan Lampiran Peraturan Komisi (UE) No 231/2012 tentang izin untuk menggunakan Advantame manis dalam berbagai jenis makanan untuk menggantikan gula,

2. Directive 2014/40 / UE dari Parlemen dan Dewan Eropa tentang pendekatan hukum, peraturan dan ketentuan administrasi negara anggota mengenai pembuatan, penyajian dan penjualan tembakau dan produk-produk terkait dan membatalkan Directive 2001/37 / EU
3. Peraturan UE No 359/2014 sehubungan dengan aturan negara-negara anggota dapat mengimpor jerami dan prinsip-prinsip yang mengatur organisasi pemeriksaan produk hewani dalam memasuki pasar internal,
4. Peraturan UE No 400/2014 terkait Perlindungan terpadu untuk memastikan residu pestisida tidak melebihi batas yang diijinkan,
5. Peraturan UE No 442/2014 menggantikan Peraturan (UE) No 1235/2008 dalam hal permintaan untuk dimasukkan dalam daftar negara ketiga yang diakui untuk tujuan kesetaraan dalam kaitannya dengan impor produk organik Impor produk organik negara ketiga.<sup>10</sup>

Kepatuhan terhadap undang-undang Uni Eropa disebabkan karena keanggotaan dalam EEA memberikan manfaat terhadap perekonomian Islandia dan adanya kekhawatiran pemerintah Islandia terhadap ancaman pengucilan dari pasar internal melalui penghentian perjanjian EEA. Meskipun demikian mekanisme ini dapat mempengaruhi status quo dalam negeri. Islandia telah mengalami penurunan kemampuan pemerintah untuk menentukan hukum dan peraturan yang berlaku di Islandia.

---

<sup>10</sup> Ringkasan Laporan Kedutaan Besar Islandia di Brussels tahun 2014

Dampak terhadap kedaulatan Islandia adalah salah satu perdebatan utama dalam politik Islandia. Pihak oposisi berpendapat bahwa perjanjian EEA melanggar konstitusi Islandia yang melarang negara untuk menyerahkan kedaulatan untuk etnitas asing. Para ahli seperti profesor hukum Guðmundur Alfredsson berpendapat lain bahwa perjanjian tersebut tidak akan mengganggu kedaulatan karena tidak menyinggung secara langsung tiga cabang pemerintahan yaitu cabang eksekutif, legislative dan yudikatif Islandia. Melalui perjanjian EEA berarti pemerintah Islandia telah setuju untuk mentransfer pengambilan keputusan dari lembaga supranasional Uni Eropa.

Keanggotaan penuh dalam Uni Eropa akan mengakibatkan keterbatasan kedaulatan Islandia, tetapi melalui EEA Islandia sudah menghadapi pembatasan kedaulatan meskipun tidak seperti negara-negara anggota resmi Uni Eropa lainnya. Pemerintah Islandia lebih menenkankan pada menjaga kedaulatan secara formal daripada mengakui pengalihan dalam pengambilan keputusan oleh Uni Eropa yang terjadi karena adanya perjanjian EEA.

### **Keuntungan Ekonomi dan Politik Islandia tetap Bergabung dalam Perjanjian EEA**

Islandia telah terlibat dalam pasar internal Uni Eropa sejak diberlakukannya perjanjian EEA pada tahun 1994. Negara anggota Uni Eropa adalah pasar yang paling penting bagi ekspor domestik Islandia, keanggotaan dalam EEA memberikan akses sekitar 96% dari ekspor ikan Islandia ke pasar internal Uni Eropa. Konsekuensi untuk mendapatkan akses ke pasar internal, perjanjian EEA membutuhkan integrasi *acquis* Uni Eropa kedalam hukum nasional negara peserta, Negara Islandia telah mengadopsi 2/3 undang-undang Uni Eropa seperti yang berkaitan dengan lingkungan, transportasi, kebersihan makanan sebagian besar disahkan parlemen Islandia melalui

perjanjian EEA, meskipun demikian pemerintah Islandia masih mempertimbangkan untuk menjadi anggota resmi Uni Eropa karena kerjasama ekonomi melalui perjanjian EEA lebih menguntungkan bagi ekonomi dan politik Islandia.

### **Kepentingan Ekonomi**

Pasar internal Uni Eropa merupakan salah satu dari pasar terbesar di dunia dengan sekitar 500 juta konsumen yang dapat memperdagangkan barang dan jasa lintas batas dari semua negara Uni Eropa ditambah Islandia, Norwegia dan Liechtenstein. Pasar internal menawarkan fleksibilitas, kualitas dan pilihan yang menguntungkan setiap konsumen dari negara anggota EEA. Bagi negara Islandia, kepentingan ekonomi untuk tetap tergabung dalam pasar internal adalah untuk memperluas pasar internasional, ekspor-impor terhadap negara anggota EEA dan meningkatkan PDB sebagai implikasi akses ke pasar internal Uni Eropa.

#### **1. Memperluas pasar internasional**

Salah satu tujuan utama kebijakan perdagangan internasional Islandia adalah untuk memperkuat daya saing perusahaan domestik di pasar global dengan memperluas hubungan perdagangan terutama dalam keanggotaan dalam EEA.<sup>11</sup> Perjanjian EEA memiliki peranan penting dalam perdagangan luar negeri Islandia. Melalui keanggotaan dalam EEA, Islandia memiliki akses perdagangan dengan 28 negara anggota Uni Eropa serta dua negara EFTA lainnya (Norwegia dan Liechtenstein) dalam suatu pasar bersama yang disebut pasar internal Uni Eropa

Perdagangan internasional memainkan peranan penting dalam perekonomian Islandia dan merupakan penyumbang dari sebagian besar PDB Islandia. Islandia mengimpor

<sup>11</sup> Trade And Investment Policy Framework [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/tpr\\_e/s164-2\\_e.doc](http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s164-2_e.doc)

berbagai barang manufaktur, meskipun andalan ekspor Islandia tetap ikan dan produk ikan. Keragaman ekspor meningkat secara signifikan setelah Islandia bergabung dalam perjanjian EEA, pemerintah Islandia memberikan keterbukaan pasar untuk liberalisasi perdagangan barang dan jasa pada tingkat multilateral, regional dan bilateral.

#### **2. Peningkatan PDB Islandia sebagai implikasi akses ke pasar internal Uni Eropa**

Keanggotaan Islandia dalam perjanjian EEA dapat memperbaiki keadaan ekonomi Islandia, dengan meningkatnya permintaan ekspor Islandia terutama pada produk dari hasil laut menjadi salah satu penyumbang PDB terbesar Islandia. Pada tahun 2013, industri perikanan telah menyumbang 12% dari PDB Islandia.<sup>12</sup> Perusahaan manufaktur yang berorientasi ekspor terus meningkat di Islandia dan berkembang dari usaha kecil dan menengah menjadi level internasional seperti dalam bidang-bidang seperti peralatan medis, obat-obatan, dan alat untuk pengelolaan makanan.

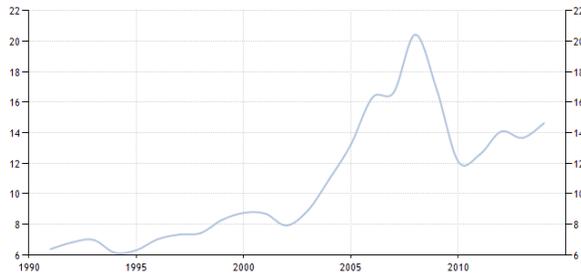
Industri manufaktur terbesar di Islandia adalah peleburan aluminium, yang memproduksi khusus untuk ekspor. Pada tahun 2007, produk manufaktur yang diproduksi menyumbang 39% dari total ekspor barang. Industri-industri manufaktur mencapai sekitar 1/4 dari ekspor barang-barang manufaktur.<sup>13</sup> Kegiatan perdagangan ini akan memacu perekonomian Islandia terutama karena negara-negara anggota EEA masih minim dalam bidang industry

<sup>12</sup> Paul Simon. 2013, *Successful Non-Membership? Can Turkey Learn Lesson from Swiss, Icelandic, and Norwegian case?*, Greensburg: University of Pittsburgh

<sup>13</sup> Bjarnason, Magnus. 2010. *The Political Economy of Joining the European Union: Iceland's Position in the Beginning of the 21st Century*. Amsterdam: Amsterdam University Press

manufaktur sehingga merupakan peluang yang sangat besar bagi Islandia.

**Grafik 1: PDB Islandia tahun 1990-2014 (USD-Miliar)**



Sumber: <http://id.tradingeconomics.com/iceland/gdp>

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan PDB Islandia mulai meningkat pada tahun 1995, setelah Islandia bergabung dalam perjanjian EEA dan terjadi angka penurunan pada tahun 2010. Hal ini disebabkan karena terjadinya krisis ekonomi 2008 yang berdampak pada menurunnya PDB Islandia. Pada tahun 2013, penyumbang terbesar PDB Islandia adalah pertanian (5,9%), industri (22,9%) dan pelayanan (71,2%).<sup>14</sup> Pelayanan menjadi penyumbang utama PDB Islandia dengan sektor utama bisnis retail (khususnya sepatu, pakaian dan furniture), pariwisata, jasa keuangan dan real este. Industri manufaktur bergantung pada sektor industri perikanan dan peleburan aluminium. Penyumbang PDB selanjutnya adalah sector pertanian. Produk pertanian Islandia terdiri dari kentang, lobak, wortel, kubis, kembang kol dan sayuran lainnya seperti tomat, mentimun dan paprika hijau. Hasil peternakan adalah daging kambing, domba, ayam, babi, sapi, produk susu dan ikan.<sup>15</sup> Tujuan ekspor Islandia pada sektor pertanian adalah ke Denmark dan Inggris.

<sup>14</sup> CIA, The WorldFact Book tersedia di <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ic.html>

<sup>15</sup> Index Mundi 2014, Iceland Agriculture Products tersedia di

Pertumbuhan PDB Islandia semakin meningkat sebagai pengaruh meningkatnya kompetisi dari ekspor-impor ke negara-negara anggota EEA. Produksi barang tidak hanya berputar di dalam negeri saja akan tetapi juga berputar di perdagangan internasional. Ekspor merupakan salah satu tolak ukur penting untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Dalam jangka panjang kegiatan ekspor dapat menjadi penyumbang devisa bagi pertumbuhan ekonomi negara.

### 3. Ekspor dan Impor Islandia ke negara anggota EEA

Kebijakan liberalisasi perdagangan Islandia diperkuat dengan bergabungnya Islandia dalam perjanjian EEA yang memberikan akses pasar bagi ekspor Islandia, khususnya pada produk hasil laut. Namun sector pertanian tetap dilindungi dan disubsidi oleh pemerintah. Ekspor Islandia terkonsentrasi dalam kelompok besar beberapa komoditas sedangkan impor sangat beragam. Islandia benar-benar tergantung pada impor untuk kebutuhan atas minyak dan kayu yang digunakan setiap tahun harus berasal dari sumber-sumber asing. Untuk barang-barang investasi, perekonomian Islandia tergantung pada impor karena sebagian besar mesin yang digunakan adalah asal luar negeri.

Wilayah Ekonomi Eropa adalah pasar terbesar untuk produk Islandia pada tahun 2010. Ekspor barang Islandia ke EEA adalah 81,8% dan impor barang dari EEA ke Islandia sebesar 61% dari total seluruh impor Islandia.<sup>16</sup> Belanda adalah mitra dagang terpenting Islandia sekaligus negara tujuan ekspor terbesar Islandia, sedangkan impor terbesar ke Islandia berasal dan Norwegia.

[http://www.indexmundi.com/iceland/agriculture\\_products.html](http://www.indexmundi.com/iceland/agriculture_products.html)

<sup>16</sup> Statistic Iceland 2010, *External-Trade, Trade in goods in 2010*, Statistical Series Vol. 96, No. 26

Nilai ekspor barang ke Belanda pada tahun 2010 sebesar 190.600 juta ISK atau 34% dari total ekspor barang Islandia.<sup>17</sup> Aluminium merupakan produk ekspor terbesar Islandia yaitu 80,4% dan merupakan alasan utama peningkatan ekspor ke Belanda. Produk laut memiliki jumlah ekspor yang relatif sedikit ke Belanda.

Jerman adalah pembeli terbesar kedua produk Islandia pada tahun 2010, ekspor barang ke Jerman sebesar 78,300 juta ISK atau 14,0% dari total ekspor, meningkat sebesar 38,9% dari tahun sebelumnya. Produk manufaktur terutama aluminium merupakan bagian terbesar dari ekspor Islandia ke Jerman yaitu sebesar 82,8%. Inggris menempati posisi ketiga negara tujuan ekspor Islandia dengan total ekspor 56,700 juta ISK atau 10,1%.<sup>18</sup> Produk laut seperti ikan kod dan haddock merupakan produk ekspor utama Islandia ke Inggris.

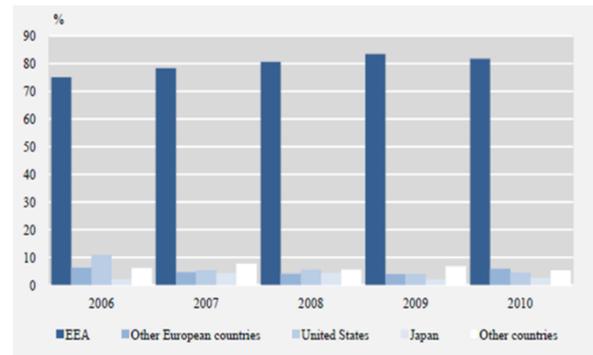
Impor ke Islandia didominasi oleh Norwegia yang mengimpor barang sebesar 42 % dari total impor barang pada tahun 2010. Impor barang dari Norwegia pada tahun 2010 sebesar 43,200 juta ISK atau 9,1% dari total impor barang Islandia. Mengenai perdagangan barang dan area pasar, negara-negara anggota EEA adalah pangsa pasar terbesar Islandia, Produk manufaktur merupakan komoditas ekspor utama Islandia yaitu 55,4% dari keseluruhan ekspor kemudian 39,3% hasil laut diekspor ke negara-negara EEA.<sup>19</sup> Impor utama Islandia adalah alat-alat mesin, produk minyak bumi, bahan makanan dan tekstil. Mitra impor utama Islandia adalah anggota EEA (Norwegia, Jerman, Belanda), Amerika Serikat dan China.

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Ibid,

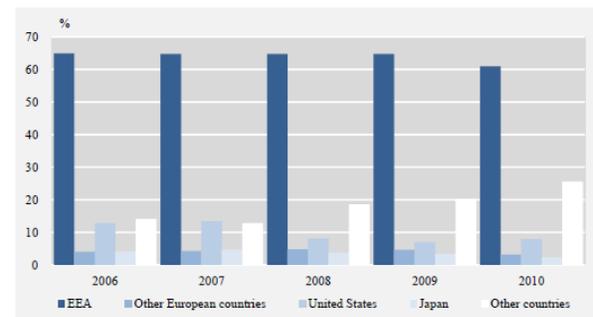
<sup>19</sup> Ibid,

**Diagram 1: Ekspor Islandia berdasarkan pasar 2006-2010**



Sumber: *Iceland External Trade 2010*

**Diagram 2: Impor Islandia berdasarkan pasar 2006-2010**



Sumber: *Iceland External Trade 2010*

### **Keuntungan Politik**

Islandia tergabung dalam EEA pada tahun 1994 dan telah mengadopsi 2/3 dari peraturan Uni Eropa. Pemerintah Islandia memberikan perhatian khusus terhadap status keanggotaan Islandia dalam perjanjian EEA melalui diskusi politik mengenai pengaruh negara kecil seperti Islandia dalam aliansi supranasional seperti Uni Eropa serta kerugian dan manfaat yang akan diperoleh melalui perjanjian EEA.

#### **1. Akses ke pasar internal tanpa harus menjadi anggota resmi Uni Eropa**

Fokus kebijakan perdagangan Islandia adalah keanggotaan Islandia dalam perjanjian EEA. Ketergantungan Islandia terhadap

perdagangan luar negeri menjadikan akses ke pasar internal Uni Eropa sangat penting bagi Islandia, meskipun demikian pemerintah Islandia tetap memilih untuk tidak bergabung sebagai anggota Uni Eropa. Krisis ekonomi 2008 yang berdampak pada menurunnya nilai mata uang krona merupakan alasan Islandia mengajukan aplikasi untuk menjadi anggota Uni Eropa tahun 2009, dengan tujuan dapat mengadopsi mata uang euro tetapi setelah terjadinya pemulihan ekonomi pada tahun 2013 Islandia memutuskan untuk menanggukkan perundingan akses Uni Eropa.

Banyak hal yang harus dipertimbangkan pemerintah Islandia untuk menjadi anggota Uni Eropa pasca pemulihan ekonomi seperti prinsip-prinsip dasar kebijakan keuangan, energy, pertanian dan kontrol perikanan Islandia yang harus disesuaikan dengan Uni Eropa. Kendala utama bagi Islandia untuk bergabung dengan Uni Eropa adalah dengan menjadi anggota Uni Eropa berarti Islandia harus melaksanakan kebijakan perikanan bersama Uni Eropa karena akan mengakibatkan kontrol nasional atas jumlah kuota tangkapan ikan Islandia diserahkan kepada Dewan Menteri Perikanan Uni Eropa. Partisipasi Islandia dalam perjanjian EEA telah memberikan keuntungan yang signifikan karena Islandia tidak perlu menjadi anggota penuh Uni Eropa untuk dapat bergabung dalam pasar internal Uni Eropa.

## 2. Melindungi Kontrol Perikanan Islandia

Melindungi kebijakan umum perikanan adalah alasan utama Islandia mempertahankan perjanjian EEA dan memilih tidak bergabung sebagai negara anggota Uni Eropa. Prinsip dasar dalam negosiasi keanggotaan dengan Uni Eropa adalah negara harus menerima dan menerapkan *acquis communautaire* ke dalam hukum nasional negara anggota, termasuk didalamnya aturan Kebijakan Perikanan Bersama (*Common Fisheries Policy* (CFP)) Uni Eropa. CFP tidak dibuat oleh negara-

negara anggota, tetapi oleh lembaga Uni Eropa sehingga tidak dapat diterima oleh Islandia.

Sektor perikanan adalah bagian yang sangat penting dari perekonomian Islandia karena kontribusi produk perikanan adalah sebesar 38% dari nilai ekspor Islandia. Industri perikanan penting bagi tenaga kerja Islandia karena sekitar 15% dari angkatan kerja Islandia bekerja pada industri yang terhubung ke industri perikanan. Pada tahun 2011 tercatat bahwa 9000 pekerjaan langsung terhubung ke industri perikanan.<sup>20</sup> Bergabung dengan Uni Eropa dan menggunakan Kebijakan Perikanan Umum Uni Eropa berarti hilangnya control dari industri perikanan Islandia, termasuk kewajiban untuk mematuhi aturan kuota yang merugikan industri perikanan karena lebih rendah daripada kuota yang diizinkan pemerintah Islandia.

Masalah lainnya adalah kebijakan perikanan umum Uni Eropa bertentangan dengan kebijakan Islandia terkait perburuan ikan paus. Uni Eropa menetapkan larangan perburuan, penangkapan dan penangkaran ikan paus dan lumba-lumba, sedangkan Islandia belum mematuhi larangan global terhadap penangkapan ikan paus yang ditetapkan oleh Komisi Penangkapan Ikan Paus Internasional (*the International Whaling Commission*) dan memungkinkan perburuan paus selama 100 hari setiap tahun.<sup>21</sup> Islandia awalnya melakukan program penangkapan ikan paus untuk penelitian. Pada tahun 1992, mengundurkan diri dari Komisi Penangkapan Ikan Paus Internasional dan kembali bergabung pada tahun 2004 tetap dengan

<sup>20</sup> Sigfuson, Dr Thor, Iceland's Ocean Economic 2011, hal. 5, tersedia di <http://sjavarklasinn.is/en/wp-content/uploads/2014/11/2.-IcelandOceanEconomy2011low.pdf>

<sup>21</sup> Euromove, Iceland's Application to Join the EU, tersedia di <http://www.euromove.org.uk/index.php?id=15077> diakses pada 28 Februari 2015, 9:00 WIB

keberatan terhadap moratorium larangan penangkapan ikan paus. Pada tahun 2006, Islandia kembali penangkapan ikan paus komersial, menargetkan minke dan fin paus. Pada tahun 2010 pemburu paus Islandia menangkap 148 paus sirip yang terancam punah dan 60 paus minke.<sup>22</sup> Keanggotaan dalam Uni Eropa berarti Islandia harus menghentikan perburuan paus yang akan berdampak pada perekonomian Islandia.

Islandia sebagai negara kepulauan sangat penting untuk mempertahankan kontrol wilayah perairan, terutama bidang perikanan yang merupakan bagian utama perekonomian Islandia. Perjanjian EEA memiliki arti penting bagi Islandia karena bergabungnya Islandia dalam perjanjian EEA dapat memberikan Islandia akses ke dalam pasar internal tanpa harus mengganggu kontrol perikanan Islandia.

### 3. Melindungi Kontrol Pertanian Islandia

Sama halnya dengan sektor perikanan, sektor pertanian Islandia juga berada diluar perjanjian EEA, dengan demikian Islandia memiliki kontrol penuh atas kebijakan pertanian tanpa adanya campur tangan dari Uni Eropa. Ada perbedaan yang cukup besar antara harga pangan Islandia dengan harga pangan Uni Eropa. Pertanian Islandia memiliki harga pangan yang jauh lebih tinggi, sekitar 60% di atas rata-rata harga pangan Uni Eropa.<sup>23</sup> Bergabungnya Islandia dalam Uni Eropa akan memberikan efek turunnya harga pangan Islandia dengan drastis karena harus menyesuaikan dengan kebijakan pangan Uni Eropa. Institute Studi Ekonomi di Universitas Islandia meperkirakan bahwa keanggotaan pada Uni Eropa akan mengurangi harga

pangan Islandia sebesar 14%.<sup>24</sup> Petani Islandia dilindungi dari barang yang diimpor oleh bea sangat tinggi pada makanan seperti daging, susu dan sayuran segar.

Harga bahan makanan di Islandia bisa hampir setengah dari harga jika negara memasuki Uni Eropa, subsidi negara kepada petani menjadi salah satu fokus kebijakan pertanian Islandia agar pertanian dalam negeri tetap kompetitif. Kontrol pertanian Islandia harus benar-benar dijaga karena kecilnya pasar dalam negeri dan jarak geografis yang cukup jauh dari negara-negara Uni Eropa. Perjanjian EEA merupakan pilihan terbaik dalam kerjasama ekonomi dengan Uni Eropa, karena selain menadapatkan akses ke pasar internal, Islandia tetap memiliki kontrol penuh terhadap sector perikanan dan pertanian Islandia.

### Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian tentang kepentingan ekonomi politik Islandia mempertahankan kerjasama ekonomi dengan Uni Eropa melalui perjanjian EEA, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Keanggotaan Islandia dalam perjanjian EEA yang dimulai sejak tahun 1994 didasarkan karena adanya kepentingan ekonomi dan politik. Secara ekonomi Perjanjian EEA memperluas pasar internasional Islandia. Melalui keanggotaan dalam EEA, Islandia memiliki akses perdagangan dengan 28 negara anggota Uni Eropa serta dua negara EFTA lainnya (Norwegia dan Liechtenstein) dalam suatu pasar bersama yang disebut pasar internal Uni Eropa. Akses ke pasar internal Uni Eropa menghasilkan peningkatan ekspor Islandia terutama pada produk perikanan dan menjadi

---

<sup>22</sup> Diakses dari <http://www.ifaw.org/united-states/our-work/whales/which-countries-are-still-whaling> pada 9 Maret 2014, 11:02 WIB

<sup>23</sup> Op Cit, Magnus, hal 155

---

<sup>24</sup> Institute of Economic Studies Universty of Iceland, . 2004. *Comparison of food prices in Iceland, the Nordic Country and in EU states*. Research Reaport

salah satu penyumbang PDB terbesar Islandia. Pertumbuhan PDB Islandia semakin meningkat sebagai pengaruh meningkatnya kompetisi dari ekspor-impor ke negara-negara anggota EEA. Produksi barang tidak hanya berputar di dalam negeri saja akan tetapi juga berputar di perdagangan internasional. Ekspor barang Islandia ke EEA adalah 81,8% dan impor barang dari EEA ke Islandia sebesar 61% dari total seluruh impor Islandia. Wilayah Ekonomi Eropa adalah pasar terbesar untuk produk Islandia pada tahun 2010 dengan mitra dagang utama adalah Belanda, Jerman dan Norwegia.

Pada bidang politik Islandia memiliki akses ke pasar internal Uni Eropa tanpa harus menjadi anggota resmi Uni Eropa. Banyak hal yang harus dipertimbangkan pemerintah Islandia untuk menjadi anggota Uni Eropa pasca pemulihan ekonomi seperti prinsip-prinsip dasar kebijakan keuangan, pertanian dan kontrol perikanan dan pertanian Islandia yang harus disesuaikan dengan Uni Eropa. Kendala utama bagi Islandia untuk bergabung dengan Uni Eropa dan lebih memilih bekerjasama dalam perjanjian EEA adalah karena dengan menjadi anggota Uni Eropa berarti Islandia harus melaksanakan kebijakan perikanan bersama Uni Eropa yang akan mengakibatkan kontrol nasional atas jumlah kuota tangkapan ikan Islandia diserahkan kepada Dewan Menteri Perikanan Uni Eropa.

Kepentingan politik selanjutnya adalah melindungi kontrol pertanian Islandia. Ada perbedaan yang cukup besar antara harga pangan Islandia dengan harga pangan Uni Eropa. Bergabungnya Islandia dalam Uni Eropa akan memberikan efek turunnya harga pangan Islandia dengan drastis karena harus menyesuaikan dengan kebijakan pangan Uni Eropa.

Perjanjian EEA merupakan pilihan terbaik dalam kerjasama ekonomi dengan Uni Eropa, karena selain menandatangani akses ke

pasar internal, Islandia tetap memiliki kontrol penuh terhadap sector perikanan dan pertanian Islandia tanpa ada campur tangan dari Uni Eropa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bergmann, Eirikur. 2011, *Iceland and the EEA, 1994-2011*, Europautredningen
- Bjarnason, Magnus. 2010. *The Political Economy of Joining the European Union: Iceland's Position in the Beginning of the 21<sup>st</sup> Century*. Amsterdam: Amsterdam University Press
- Einar Hanneson. 2006. Implementation of Internal Market Legislation Relevant to The Information Society: A Snapshot of the Current Regime in EFTA-EEA States. *Journal of International Commercial Law and Technology, Vol. Issue 1*
- Holsti, K.J. 1988. *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis (Jilid II)* terjemahan M.Tahrir Azhari, Jakarta: Erlangga
- Institute of Economic Studies University of Iceland, . 2004. *Comparison of food prices in Iceland, the Nordic Country and in EU states*. Research Report
- Linberg, Leon N. (1963), *The Political Dynamics of European Economic Integration*, London
- Michael Alsbjerg dan Jesper Blaabjerg, 2012. *The EEA Agreement or the EU?*, (Master Thesis) Aalborg University
- Paul Simon. 2013, *Successful Non-Membership? Can Turkey Learn Lesson from Swiss, Icelandic, and Norwegian case?*, Greensburg: University of Pittsburgh
- Ringkasan Laporan Kedutaan Islandia di Brussels pertengahan tahun 2014

Statistic Iceland 2010, *External-Trade, Trade in goods in 2010*, Statistical Series Vol. 96, No. 26

Steans, Jill & Lloyd Pettiford. 2009, *Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema*, Yogyakarta: Pustaka Belajar

CIA, The WorldFact Book tersedia di <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ic.html>

Euromove, Iceland's Application to Join the EU diakses dari <http://www.ifaw.org/united-states/our-work/whales/which-countries-are-still-whaling> pada 9 Maret 2014, 11:02 WIB

European Commission Directorate-General for Trade (Countries and regions, Islandia), tersedia di <http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/iceland/> , Diakses pada 9 Maret 2014, 11:18

European Free Trade Association Official Website tersedia di <http://www.efta.int/>, Diakses pada 9 Maret 2014, 11:18 WIB

Index Mundi 2014, Iceland Agriculture Products tersedia di [http://www.indexmundi.com/iceland/agriculture\\_products.html](http://www.indexmundi.com/iceland/agriculture_products.html)

Joshua Fleitman, 2014. The Icelandic Model: Post-Crisis Economic Recovery and Sustainability tersedia di [monitorjournal.org/issues/19-1/1-fleitman.pdf](http://monitorjournal.org/issues/19-1/1-fleitman.pdf) diakses 7 Januari 2015, 9:47 WIB

Sigfuson, Dr Thor, *Iceland's Ocean Economic2011*, hal. 5, tersedia di <http://sjavarklasinn.is/en/wp-content/uploads/2014/11/2.-IcelandsOceanEconomy2011low.pdf>

Statistik Islandia (The National Institute of statistik Islandia) tersedia di <http://www.statice.is/statistics/population> . Diakses 9 Maret 2014, 11:02 WIB

Trade And Investment Policy Framework [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/tpr\\_e/s164-2\\_e.doc](http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s164-2_e.doc)